PEREKONOMIAN INDONESIA:

Mengoptimalkan bonus demografi

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

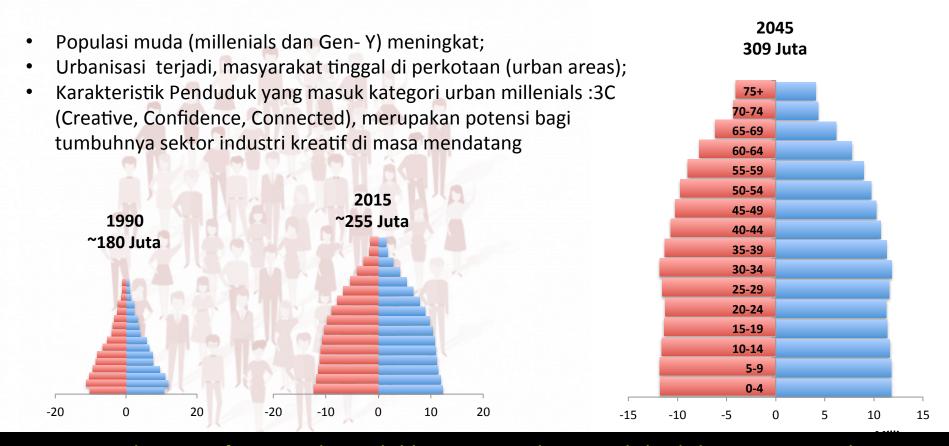
IndonesiaX Jakarta, 4 Desember 2017



- Dunia akan berbeda dengan saat ini, teknologi sudah semakin maju (Driverless car, Artificial Intelligence)
- Konsep pertanian, pangan, energi, transportasi dan konstruksi makin efisien, mobilitas dan tata ruang perkotaan makin efisien, mudah dan murah.
- Keamanan pangan, keamanan energi, keamanan pasokan air menjadi faktor kunci dalam perekonomian dan hubungan antar negara.
- Miliaran orang akan terhubung melalui gadget yang dapat dilengkapi dengan aplikasi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence), robotik, nanoteknologi, bioteknologi, maupun komputasi kuantum

Penguasaan Teknologi, Inovasi dan Produktivitas menjadi faktor kunci dalam menjadi pemenang di kompetisi global.

Tahun 2045 penduduk dunia **mencapai 9,3 miliar jiwa** dan Indonesia diproyeksikan mencapai 309 juta jiwa.



Bonus demografi menjadi modal kemajuan ekonomi bila didorong peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, keterampilan, terciptanya lapangan kerja

MENUJU INDONESIA 2045

SISI EKONOMI

Indonesia tahun 2030 — 2045 mendapatkan manfaat dari sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

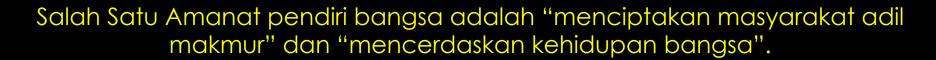
Berkembangnya financial technology (fintech) mendorong jasa keuangan yang lebih mudah dan cepat.

Sektor tersier menjadi sektor utama dalam ekonomi.

Menuju tahun 2030 peningkatan mobilitas membantu pertumbuhan ekonomi yang stabil serta mendukung tumbuhnya masyarakat berpenghasilan menengah. Perkembangan teknologi, khususnya komunikasi, mendorong pertumbuhan sektor bisnis baru (digital economy) menggunakan teknologi digital dan robotik.



dan bertanggung jawab untuk membawa Indonesia mendekati tujuan kemerdekaan



Dalam konteks saat ini "mencerdaskan kehidupan bangsa" berarti membentuk bangsa yang <u>kreatif dan inovatif sehingga dapat bersaing di tingkat</u>
<u>global</u>

Indonesia Mempunyai Potensi Yang Besar













Dengan posisi yang strategis dan sumberdaya alam yang melimpah, Indonesia berpotensi mempunyai peran besar dalam rantai produksi dunia

Indonesia telah mendapat pengakuan atas reformasi ekonomi & struktural

Creditworthiness, doing business, kepercayaan pada pemerintah, hingga daya saing

Ease of Doing Business 2018

naik

19

peringkat

Posisi Indonesia naik dari 91 menjadi 72. Perbaikan ini merupakan kelanjutan dari perbaikan 15 peringkat dari survey tahun sebelumnya. Saat ini posisi Indonesia berada di atas Tiongkok, India, Brazil, dan Philippines

Investment Grade dari Standard and Poor's

BBB-

Indonesia mendapat peringkat *investment grade* dari seluruh lembaga rating: S&P, Moody's dan Fitch.

Galup World Poll

#1

Indonesia bersama dengan Swiss meraih predikat negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kepada Pemerintah

Global Competitiveness Index 2017-2018

naik

5
peringkat

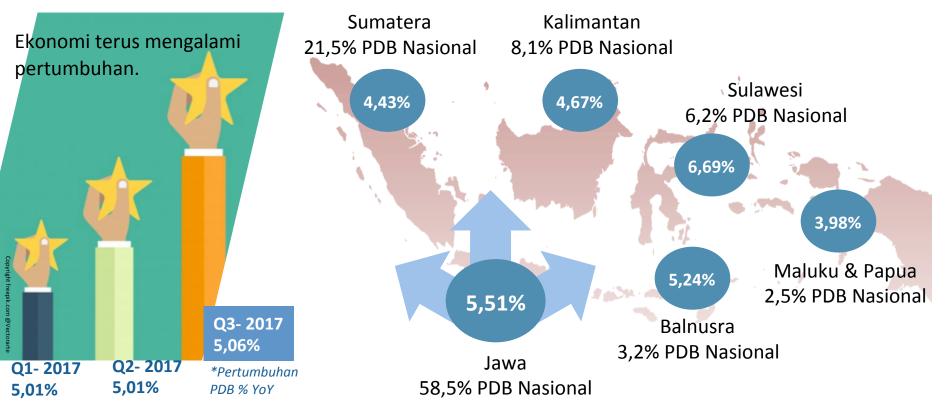
Posisi Indonesia naik dari 41 menjadi 36. 9 dari 12 pilar penilaian mendapatkan kenaikan skor antar lain: *Institution, Infrastructure, macroeconomic, health and primary education, technological readiness, business sophistication*

PDB INDONESIA Q3 2017 TUMBUH

Aktivitas Ekonomi Masih Terkonsentrasi di Jawa

perbaikan pada pulau lain, khususnya yang tumbuh dirorong non Komoditas

5,06% (yoy)



Kebijakan disusun untuk pertumbuhan berkelanjutan, ditopang oleh aktivitas bernilai tambah dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR (Ekonomi & Pembangunan Inklusif)



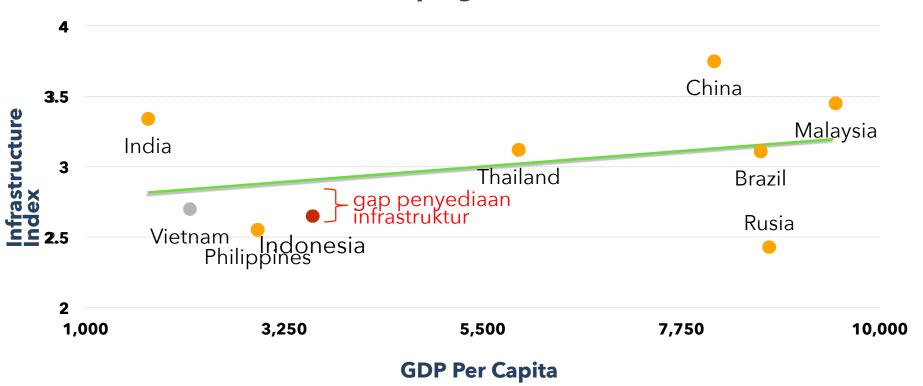




TANTANGAN PEMBANGUNAN

Gap Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara



PERLU ADA SINERGI KEBIJAKAN DI SEMUA SEKTOR UNTUK MENGATASI TANTANGAN PEMBANGUNAN







FISKAL/ APBN APBN yang produktif Pendapatan Negara Belanja Negara Pembiayaan/Utang

Iklim Investasi Daya Beli Ketenagakerjaan Perdagangan Industri SEKTOR RIIL

PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF MONETER

Stabilitas Harga (Inflasi) Stabilitas Nilai Tukar Uang beredar Suku bunga

APBN Sebagai Jangkar Perekonomian

PENDAPATAN

- Pajak (sumber penerimaan, redistribusi dan insentif)
- Bea Cukai (penerimaan, pengendalian konsumsi, investasi perdagangan)
- PNBP (peneriman, pengendalian lingkungan dan SDA, kinerja BUMN)
- Hibah

BELANJA

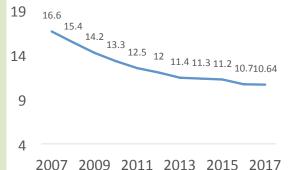
- Pemerintah Pusat (produktivitas, investasi, konsumsi)
- Transfer ke Daerah (pemerataan, pemberdayaan daerah)
- Dana Desa (pemberdayaan desa)

PEMBIAYAAN

- Utang (SBN, pinjaman LN)
- Investasi (a.l infrastruktur)

GINI Ratio¹ 0.413 0.408 0.42 0.410 0.410 0.406 0.394 0.40 0.38 0.360 0.370 0.393 0.380 0.36 0.350 0.34 0.32 0.30 2007 2009 2011 2013 2015 2017



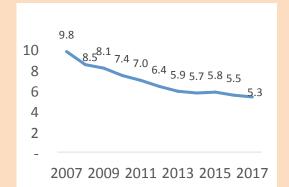


Kesejahteraan Masyarakat adil dan makmur

opyright @freepik.com



Pengangguran (%)¹



Tantangan

- Disparitas akses permodalan
- Akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin
- Kondisi geografis
- Perubahan iklim

Investasi Melalui APBN

ALOKASI

DISTRIBUSI

STABILITASI

Sumber Daya Manusia

- Pendidikan
- Penguasaan teknologi
 - Kesehatan
- Agama, Budi pekerti





Infrastruktur

- Konektivitas
- Produktivitas
 - Mobilitas

Institusi

- Birokrasi yang efisien
- Perang terhadap korupsi
- Peran Pemerintah Daerah



- Kebijakan Fiskal fokus pada kualitas belanja (big push policy), didukung oleh penerimaan berbasis pada aktifitas ekonomi, optimalisasi pengelolaan aset serta pengelolaan utang yang terkendali.
- Alokasi anggaran infrastruktur diarahkan ke pemerintah daerah.
- Belanja infrastruktur mendorong produktivitas nasional dan ekonomi yang memiliki daya saing dan mampu berkompetisi secara regional.
- Penyiapan modal dasar (Infrastruktur, stabilitas ekonomi, konektivitas, elektrifikasi). Penyiapan sumber daya manusia (pendidikan kejuruan)

menuju 2030

2030 - 2045

- APBN menuju terciptanya anggaran berimbang (balance budget).
- Fokus pada belanja kesehatan, perlindungan sosial dan pensiun sebagai akibat perubahan pola dependency ratio (aging population).
- Pertumbuhan ekonomi **berkelanjutan**, didukung oleh **pasar domestik yang besar** dan **industrialisasi** yang mencapai tahap yang matang.

Kebijakan Belanja

Untuk pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim usaha yang produktif

Kemiskinan dan Kesenjangan

- Program perlindungan sosial (PKH)
- Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)
- Pelayanan Kesehatan
- Pendidikan
- Program Indonesia Pintar

Infrastruktur

- Pembangunan Jalan
- Peningkatan konektivitas
- Pembangunan Irigasi
- Peningkatan Rasio Elektrifikasi
- Pembangunan Rusun

Sektor Unggulan

Pertanian

- Peningkatan pangan dan pembangunan sarpras
- Pengembangan hortikultura

Pariwisata

- Pengembangan destinasi wisata
- Promosi pariwisata

Perikanan

- Peningkatan daya saing produk olahan perikanan
- Bantuan kapal
- Kelestarian lingkungan

Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat

- Reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Kesejahteraan aparatur dan pensiunan
- Perbaikan sistem dan manfaat pensiun aparatur negara
- Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri.

Pertahanan Keamanan dan Demokrasi

- Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan
- Keamanan
 Pemeliharaan
 keamanan dan
 ketertiban dan
 penyelidikan/
 penyidikan pidana
- Penyelenggaran pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019.

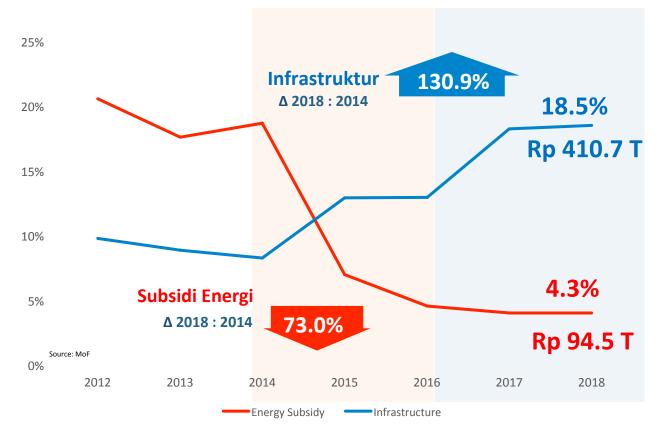
Anggaran Infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas

Mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur.



Meningkatkan kualitas belanja untuk meningkatkan daya saing

Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

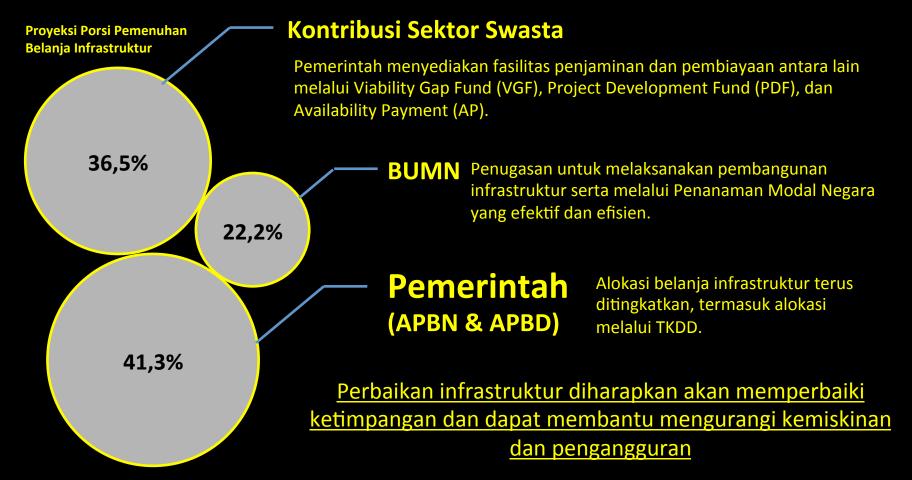


Persentase anggaran untuk subsidi energi terhadap total belanja negara terus menurun, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur

- Upaya peningkatan kualitas belanja dipusatkan pada pengalokasian pada jalur produktif seperti infrastruktur, program sosial, dan subsidi yang ditargetkan dengan lebih baik
- Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kualitas masyarakatnya melalui belanja pendidikan dan kesehatan yang baik.
- Alokasi pendidikan dan kesehatan akan dipertahankan sebesar 20% dan 5% dari anggaran.

Indonesia membutuhkan hampir Rp5000 Triliun belanja infrastruktur*

Namun tidak seluruhnya mampu dipenuhi oleh Pemerintah melalui APBN



^{*}periode 2015 – 2019 berdasarkan RPJM

Anggaran prioritas untuk penciptaaan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas

Mempertahankan alokasi khusus untuk Kesehatan dan Pendidikan





- 20% dari Belanja
- Kartu Indonesia Pintar
- Peningkatan Fasilitas Sekolah
- Beasiswa (Bidik Misi, LPDP)
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



Kesehatan

- 5% dari Belanja
- Program Indonesia sehat
- Peningkatan Fasilitas Kesehatan
- Imunisasi nasional
- Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (BPSJ)

© hamdanhasan.deviantart.com

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN 2018 naik

karena meningkatnya pendapatan negara yang dibagihasilkan

Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.



Transfer ke Daerah Rp706,2 T

Dana Bagi hasil (Rp89,2 T) dan Dana Alokasi Umum (Rp401,5 T) digunakan 25% untuk belanja infrastruktur.

Dana Insentif Daerah (Rp8,5 T) untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.

DAK Fisik Rp62,4 T & DAK Non-Fisik Rp123,5 T

Dana Desa Rp. 60 T

- Reformulasi Dana Desa dengan semakin fokus untuk pengentasan kemiskinan, memerhatikan pemerataan dan keadilan. Afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi;
- Memperbaiki ketimpangan antardesa dalam alokasi dana desa dengan indeks gini yang rendah.

Dengan defisit yang rendah Indonesia mampu tumbuh tinggi

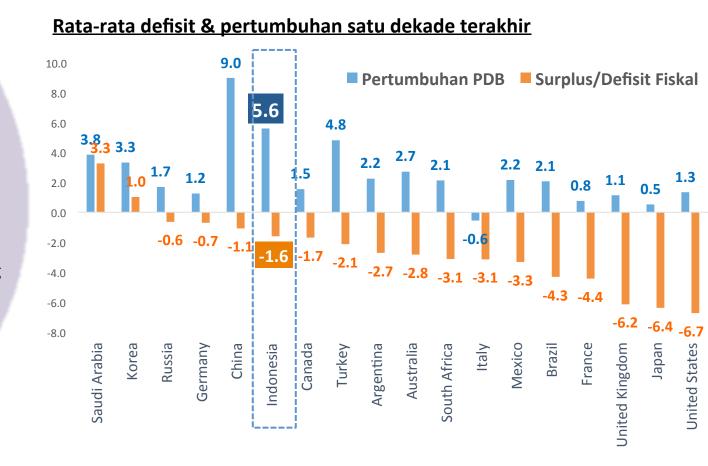
tingkat defisit APBN tahun 2018 adalah 2,19 persen

Produktif: utang untuk kegiatan produktif; akselerasi prioritas pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pembangunan daerah

Efisiensi : Rasio pembayaran bunga utang terhadap *outstanding* utang rendah.

Hati-hati menjaga rasio utang terhadap PDB.

Defisit Indonesia terhadap PDB 2014*: 2,14%, 2015*: 2,58% 2016*: 2,49%*, 2017**: 2,67% 2018*** 2,19%



Pembiayaan anggaran dilaksanakan hati-hati dan produktif

Rasio utang terhadap
PDB dan tingkat utang
per kapita Indonesia
merupakan salah satu
yang paling rendah.

Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga keberlangsungan (sustainabilitas) keuangan negara untuk menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiskal.

Kebijakan pembiayaan juga mendorong kinerja investasi pemerintah yang produktif serta tepat sasaran, serta mengoptimalkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjaga kehati-hatian.



Indonesia adalah negara dengan defisit yang rendah namun mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Defisit anggaran digunakan dengan produktif untuk menciptakan pertumbuhan.

Pemerintah akan menjaga defisit dan utang pada tingkat yang terkendali dan sesuai dengan amanat Undang – Undang (defisit dan rasio utang masing-masing di bawah 3% dan 60% terhadap PDB).

Indonesia saat ini memiliki peringkat **investment grade (layak investasi)** dari lembaga pemeringkat utama dunia. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah.

Copyright @freepik.com

Segala Tantangan Harus Diatasi Agar Indonesia Dapat Mencapai Potensi Pembangunan

POTENSI INDONESIA di 2045



DEMOGRAFI

- Penduduk 309 juta jiwa
- Usia produktif 52%
- 75% tinggal di kota
- 80% kelas menengah



EKONOMI

- Ekonomi <mark>Ke-5</mark> terbesar di dunia
- Pendapatan per kapita US\$29.300
- Struktur ekonomi bergeser pada sektor bernilai tambah tinggi
- 73% kue ekonomi di *sektor jasa*



Kesiapan infrastruktur



Kesiapan teknologi



Tata ruang wilayah





Kelembagaan Pemerintah



Sumber Daya Ekonomi & Keuangan (APBN)

Jika prasyarat tidak terpenuhi, *demographic dividend* dapat berubah menjadi *demographic burden*



INVESTASI SEDARI DINI

Merujuk pada model "Endogenous Growth":

Pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan akan sangat bergantung ketersediaan modal manusia, kapasitas inovasi dan R&D, serta pengembangan teknologi (technological advancement).

Kita perlu memberi peran lebih pad<mark>a kegiatan penelit</mark>ian dan pengembangan, khususnya yang menggunakan sarana teknologi.

Strategi Pendidikan dan Pelatihan harus flexibel dan dinamis untuk mengakomodasi perkembangan teknologi.

Konsisten berinovasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Massive Open Online Course (MOOC) bisa menjadi inovator dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Thank You